

## PENGELOLAAN APBD

2021

PERBUP CIANJUR NOMOR 119, BD 2021/NO. 119, 6 HLM

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

#### ABSTRAK :

- Untuk mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berjalan sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, perlu membuat pedoman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP No. 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 42, TLN No. 6322); Permen No. 77 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1781); Permendagri No. 55 Tahun 2008 Permendagri No. 27 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No. 926); Perda No. 02 Tahun 2007 (LD Tahun 2007 No. 02 Seri D) Perda No. 18 Tahun 2021 (LN Tahun 2018 No. 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Bupati No. 74 Tahun 2019 (BD Tahun 2019 No. 74)
- Dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/PPKD ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Cianjur yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Usaha Mikro dalam usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan usaha kecil dalam usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Pedoman pengelolaan APBD

digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari APBD, sistematikan pedoman pengelolaan APBD, pedoman pengelolaan APBD tahun anggaran 2022 meliputi ; pengadaan barang dan jasa, tata cara pergeseran anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengelolaan barang milik daerah, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021
- Penjelasan 6 halaman